

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tekanan dan sanksi internasional yang dijatuhkan Barat terhadap terkait dukungan Korea Utara terhadap serangan siber Lazarus Group telah mempersempit ruang gerak Korea Utara dalam sistem internasional. Menghadapi hal tersebut, pemanfaatan ruang siber dengan mengeksploitasi *loophole* dalam hukum internasional dan kontrol terhadap domestik untuk menjaga kepercayaan warganya menjadi langkah strategis Korea Utara. Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa Korea Utara tidak memandang tuduhan kejahatan siber sebagai ancaman dan tekanan saja, melainkan cara Korea Utara dalam mengelola tuduhan tersebut sebagai bagian untuk mempertahankan legitimasi negara dan menaikkan posisi tawar internasional.

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Korea Utara menerapkan strategi respon multidimensi dalam menghadapi tuduhan *state sponsored activism*. Strategi ini meliputi penolakan langsung terhadap keterlibatan dalam serangan siber, menggunakan *counter labelling* dengan menuduh Amerika Serikat dan sekutunya melakukan politisasi isu keamanan siber dan standar ganda, serta melakukan pengelolaan stigma dalam domestik. Dalam domestik, Korea Utara membingkai bahwa tuduhan ini merupakan bentuk propaganda dan tekanan Barat untuk menggulingkan pemerintahan Korea Utara. Narasi ini dimanfaatkan untuk memperkuat nasionalisme masyarakat dan mempertahankan legitimasi politik rezim.

2. Ruang siber menjadi instrumen kekuatan asimetris Korea Utara. Melalui operasi yang dilakukan oleh Lazarus Group, Korea Utara memperoleh sumber pendanaan alternatif melalui pencurian aset finansial digital, khususnya *cryptocurrency*. Aktivitas ini menjadi salah satu sumber pendanaan non-konvensional yang signifikan bagi Korea Utara di tengah tekanan embargo, sanksi, dan kondisi isolasi, terutama untuk menopang pembangunan domestik serta mendukung pengembangan program militer seperti program nuklir dan rudal balistik.
3. Korea Utara memanfaatkan *loophole* dalam hukum internasional dalam lingkup siber untuk terus melakukan operasinya. Kompleksitas teknis dalam atribusi serangan siber dalam hukum internasional telah menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan Korea Utara untuk terus melakukan operasi siber tanpa secara langsung memicu eskalasi konflik militer konvensional. Kondisi ini memberikan ruang bagi Korea Utara untuk tetap menjalankan strategi siber sebagai alat politik dan ekonomi tanpa menghadapi konsekuensi militer langsung.
4. Tekanan dan label yang dijatuhkan kepada Korea Utara justru berkontribusi terhadap konsolidasi hegemoni domestik. Melalui kontrol sosial yang ketat, propaganda negara, serta pembangunan infrastruktur domestik, pemerintah Korea Utara mampu membentuk *common sense* di kalangan masyarakat bahwa penguatan kemampuan pertahanan negara, baik melalui pengembangan nuklir maupun operasi siber merupakan langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan negara dari ancaman eksternal.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai respon Korea Utara terhadap tuduhan serangan siber oleh Lazarus Group, penulis merumuskan beberapa saran praktis dan akademis. Secara praktis, mengingat adanya ambiguitas dalam atribusi serangan siber di bawah kerangka hukum internasional saat ini, diperlukan upaya kolektif dari masyarakat internasional untuk memperjelas norma-norma perilaku negara di ruang siber. Hal ini mencakup pengembangan mekanisme verifikasi yang lebih transparan dan objektif untuk menghindari eskalasi ketegangan yang diakibatkan oleh perbedaan persepsi antarnegara. Selain itu, bagi institusi finansial dan pengelola aset digital global perlu meningkatkan infrastruktur keamanan siber dan transparansi transaksi menjadi krusial untuk memitigasi risiko aktivitas ekonomi non-konvensional yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan internasional, terlepas dari aktor yang terlibat.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi studi selanjutnya dalam mengkaji perilaku negara yang menghadapi tekanan internasional secara berkepanjangan. Peneliti di masa depan disarankan untuk melakukan studi komparatif yang lebih luas mengenai bagaimana berbagai negara yang berada dalam posisi terisolasi menggunakan ruang siber sebagai instrumen kedaulatan dan strategi bertahan. Selain itu, penting bagi penelitian mendatang untuk menelaah efektivitas sanksi siber dalam mengubah perilaku negara aktor untuk memahami apakah instrumen tersebut berfungsi sebagai alat pencegah atau justru mendorong adaptasi teknologi yang lebih kompleks.